

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aditya dan Umi Rozah, 2015. Asas & Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana. Semarang: Pustaka Magister.
- Andi Hamzah, 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asmeny Azis Izlindawati, 2018. Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum. Jakarta: Kencana.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."
- Bambang Waluyo, 2016. Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1988. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C S A Lesmana Teddy, 2020. Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pena Persada.
- Darwan Prinst, 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta: Jambatan.
- Djoko, Prakoso, and Murtika I Ketut. Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Eddy, O.S Hiariej, 2012. Teori Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Florentina Dwi Astuti, 2023. Sistem Hukum Indonesia. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Gomgon TAPI Siregar, 2020. "Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana." CV, Manhaji Medan.
- Hari Sasangka, dan Lili Rosita, 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Bandar Maju.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2020. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia.
- Kadek Agus Ambara, 2024. "Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda." Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Lili Rasjidi, and I.B.Putra Wyasa, 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi, 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M Khozim, and Nurainun Mangunsong, 2021. Sistem Hukum Dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia.
- M.Yahya, Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Mohammad Farid Wajdi, dkk., 2023. Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mohammad Putra Eka, 2010. Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru. Medan: USU Press.
- Mulkan, Hasanah. Buku Ajar Tindak Pidana Khusus, 2022.
- Nikolas Simanjuntak. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus HUKUM. Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.
- Philipus M. Hadjon, 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Peradaban.
- Pontang Moerad, 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. Bandung: Alumni.
- R. Soebekti, and R. Tjitrosuidio. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- Salle, 2020. Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Satjipto Rahardjo, 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: Uki Press,.
- Satjipto, 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT Revika.
- Siswanto Sunarso, 2022. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika.

Sudarto, 2007. Hukum & Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni.

Widyopramono, 2014. Kependium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum. Bandung: PT Alumni.

Yahya Harahap, 2015. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya M. Harahap, 2002. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin, 2012. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Agus, Ambara Kadek. "Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

M Nur Ma'rifatul Fatmi, 2024. "Analisis Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Nomor: 643/Pid. Sus/2022/PN. Jmb." Universitas Batanghari Jambi.

Samosir, Herlina. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidana Penjara Sebagai Sanksi Uang Pengganti Yang Tidak Dibayar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Tahun 2015-2016)." Ilmu Hukum S2, 2018.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Al Asghor, Ali, Muhammad Arifin, and Agusta Ridha Minin. "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik" 5, no. 2 (2024): 304–311.
<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

Alfazein Harahap, Odi, Elissa Virginia, and Muhammad Zhahab Limoya. "Comparison of Theory and Practice of State Administration Between Indonesia and England and the United States." Jurnal Multidisiplin Indonesia 3, no. 1 (2024): 607–615.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Majalah hukum nasional (2012): 1–17.
https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

- Damanik, Roceberry Ceristanthy, and T Erwinsyahbana. "Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Doktrin Review* 1, no. 1 (2022): 163–174.
- Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, Muhamad Fathony, and Desti Indah Sari. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023): 113–128.
- Dian Rosita. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (2019): 88–100.
- Erlyana, and Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace." *Perspektif Hukum* (2024): 26–44.
- Fatmi, M Nur Ma'rifatul. "Analisis Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Nomor: 643/Pid. Sus/2022/PN. Jmb." Universitas Batanghari Jambi, 2024.
- Fevernova, Fiona Florencia, and Hery Firmansyah. "Tinjauan Peran LPSK Dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4235–4242.
- Ghozali, Imam. "Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 601–610.
- Hakim, Rohman. "Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 80–97.
- Hukum, Penegakan, and L A W Enforcement. "Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015" III, no. 6 (2015): 157–165.
- Jimly Asshiddiqie, 2012. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Majalah hukum nasional* (2012): 1–17. https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Jumadi, Jumadi. "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 18–28.

- Jumadi, Jumadi. "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 18–28.
- Korua, Ryvaldo Vially. "Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020).
- Kotu, Mairiko Alexander. "Penerapan Asas Nebis in Idem Dalam Putusan Perkara Pidana." *Lex et Societatis* 4, no. 2.1 (2016).
- Kurniawan, I Wayan Edi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 154–158.
- Maharani Fadhila Priscilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana" 13, no. 4 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56657>.
- Marasabessy "Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism." *Journal of Law & Developmen* 45, no. 1 (2015): 53–75.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016): 53–75.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism." *Journal of Law & Developmen* 45, no. 1 (2015): 53–75.
- Mufrohim, Ook, and Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–386.
- Muhidin, Asep. "Legal Certainty Regarding the Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 405–428.
- Nasir, Muhammad, Johari Johari, T. Halimah, Phoenna Ath Thariq, and Ummi Kalsum. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Penipuan." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 50.
- Nirwansyah, ST. "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 178–183.
- Nur, Zulfahmi. "Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 119–142.

- Palit, Geofani Indra David. "Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021).
- Pidana, Perkara, Berdasarkan Kitab, and Undang-undang Hukum Acara Pidana. "Pelaksanaan-Putusan-Pengadilan-Dalam-Perk" VI, no. 3 (2017): 86–93.
- Pramana, Gatra Yudha. "Claim for Damages in Criminal Actions to Achieve Justice for Victims." *Ius Poenale* 1, no. 1 (2020): 39–50.
- Prihandana, Reza, Tri Satrio Wahyu Murthi, Jhonson Efendi Tambunan, and Irwan Syafari. "Wewenang Jaksa Di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 111–128.
- Prihandana, Reza, Tri Satrio Wahyu Murthi, Jhonson Efendi Tambunan, and Putra, Indratanto Samudtra, Nurainun, and Kleden Kristoforus. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.
- Putri and Rianda Prima. "Pelaksanaan Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 176.
- Putri SH.,MH, Rianda Prima. "Pelaksanaan Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 176.
- Rachardiyanto, Tony. "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 316–327.
- Ridwan, Ir H Juniarso, and M H Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47.
- Sabri, Fadillah. "Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 398.
- Salsah, Kirana Najma, and Rianda Dirkareshza. "Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Ilegal Pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023): 343–354.

- Samosir, Herlina. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidana Penjara Sebagai Sanksi Uang Pengganti Yang Tidak Dibayar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Tahun 2015-2016)." Ilmu Hukum S. 2, 2018.
- Sudiarto, Kurniawan, and Aris Munandar. "Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dispute Resolution Outside of Court." Jurnal Kompilasi Hukum 8, no. 1 (2023): 65–73. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.131>.
- Sulistiani, Lies. "Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KuHP Dan Di Luar KuHP." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, no. 1 (2022): 81–101.
- Supit, Allan Rouwman. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Lex Privatum 4, no. 7 (2016): 117–123.
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 6, no. 2 (2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Yurisprudensi